

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1970, dunia telah mencapai perkembangan urbanisasi yang cepat. Urbanisasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan inovasi jika dikelola dengan baik. Namun, kecepatan dan skala urbanisasi membawa tantangan, seperti perumahan, infrastruktur, transportasi, layanan dasar, dan pekerjaan. Sekitar 56% dari populasi dunia, yaitu sekitar 4,4 miliar penduduk, tinggal di kota (The World Bank, 2023). Pada tahun 2045, populasi perkotaan dunia akan meningkat 1,5 kali menjadi 6 miliar. Kecenderungan ini diperkirakan akan terus berlanjut, dengan populasi perkotaan yang lebih dari dua kali lipat ukurannya saat ini menjelang tahun 2050 (The World Bank, 2023).

Urbanisasi telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi dan masyarakat modern, dan telah menjadi simbol penting dari modernisasi. Tingginya populasi di kota menjadikan lebih dari 80% dari PDB global dihasilkan di kota-kota (Wang, Liu, Liao, & Wei, 2021). Menurut prediksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, proses urbanisasi dunia akan terus mendorong ke depan di masa depan. Pada tahun 2050, populasi perkotaan dunia akan melebihi 6,6 miliar, dan tingkat urbanisasi akan mencapai 68% (UNPD (United Nations Population Division), 2019).

Pada saat yang sama, emisi CO₂ kumulatif yang dihasilkan oleh aktivitas urbanisasi menyumbang sekitar setengah dari total sejak Revolusi Industri (Wang, Liu, Liao, & Wei, 2021). Saat ini, 600 kota teratas di dunia menyediakan tempat tinggal bagi 20% dari populasi global, menciptakan sekitar 60% dari PDB, dan menghasilkan sekitar 70% dari gas rumah kaca (UN-Habitat, 2016).

Setelah sebuah kota dibangun, bentuk fisiknya dan pola penggunaan lahan dapat terkunci selama beberapa generasi, menyebabkan perluasan yang tidak berkelanjutan. Konsumsi lahan perkotaan yang berkembang melampaui pertumbuhan populasi hingga 50%, yang diperkirakan akan menambahkan 1,2 juta km² area perkotaan baru ke dunia

pada tahun 2030 (Wang, Liu, Liao, & Wei, 2021). Penciptaan kawasan perkotaan yang luas ini menimbulkan tekanan pada lahan dan sumber daya alam, yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan; kota-kota mewakili dua pertiga dari konsumsi energi global dan menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca.

Dalam hal ini kota-kota memainkan peran yang semakin penting dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan tingkat resiko terhadap perubahan iklim dan potensi bencana meningkat seiring pertumbuhannya. Tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat kota sangat penting. Wilayah perkotaan menghasilkan 70% of emisi gas rumah kaca yang diproyeksikan akan terus meningkat di masa yang akan datang, dengan memperhatikan trend urbanisasi dan peningkatan konsumsi energi di wilayah perkotaan. Kota Yogyakarta adalah salah satu kota penting di Indonesia yang memiliki tantangan terkait perubahan iklim. Faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, aktivitas ekonomi, dan industrialisasi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan ancaman terhadap lingkungan kota. Peningkatan maupun penurunan intensitas hujan, perubahan pola cuaca, dan kenaikan suhu adalah beberapa dampak yang dirasakan oleh warga Kota Yogyakarta.

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak dan kompleks. Keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas utama dalam agenda internasional. Pada tahun 2015 saat pelaksanaan Conference of the Parties UNFCCC ke-21 (COP 21) di Paris, dicapai Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang bertujuan untuk membatasi peningkatan agregat suhu global dibawah dua derajat Celsius dan berupaya agar tercapai pengurangan sebesar 1.5 derajat Celsius jika dibandingkan dengan era sebelum era revolusi industri. 196 negara menyetujui dan meratifikasi kesepakatan ini, termasuk Indonesia.

Salah satu langkah partisipatif Pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global adalah dengan cara aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengendalian perubahan iklim. Pertemuan tersebut lebih dikenal dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties* (UNFCCC COP).

Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Konvensi Perubahan Iklim Internasional



Gambar 1 : (Permana, Rulliadi, & dkk, 2019)

Selain menghadiri konvensi perubahan iklim internasional, Indonesia juga berkomitmen melalui penyusunan *Nationally Determine Contribution* (NDC). NDC ini merupakan ekspresi dari komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Persetujuan Paris yang telah disetujui pada tahun 2015. Indonesia menjelaskan upaya komitmen emisi rendah karbon dan ketahanan iklim setelah tahun 2020 melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia untuk tahun 2030 oleh Presiden Joko Widodo sebesar 29% (Counter Measure 1/CM1) dengan upaya nasional dan 41% (Counter Measure 2/CM2) dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan kondisi bisnis seperti biasa (Republic of Indonesia, 2022). GRK yang dijelaskan dalam NDC Indonesia melibatkan karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) (Permana, Rulliadi, & dkk, 2019).

Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara produsen karbon terbesar di dunia. Negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 43,2% dari tingkat emisi dalam skenario 'bisnis seperti biasa' (business-as-usual/BAU) pada tahun 2030

(Haesra, 2023). Visi jangka panjangnya adalah mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat, sesuai dengan kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) terbaru (Haesra, 2023).

Untuk mencapai target global dan nasional dalam NDC (*Nationally Determine Contribution*) sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Paris dibutuhkan upaya kolaborasi dengan pemda, aktor sub-negara, pihak swasta, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tingginya angka urbanisasi menjadikan kota sebagai subjek penting dalam mewujudkan komitmen tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menurunkan emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan. Membangun kota yang "berfungsi" sebagai kawasan hijau, tahan bencana, dan inklusif, memerlukan koordinasi kebijakan yang intens dan pilihan investasi. Pemerintah nasional dan lokal memiliki peran penting dalam bertindak sekarang, membentuk masa depan pembangunan mereka, dan menciptakan peluang bagi semua pihak.

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan pemerintah kota/local mengalami keterbatasan dalam sumber daya dan akses untuk mendapatkan sumber pendanaan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia harus mengalokasikan dana sekitar 322 miliar dolar AS untuk mencapai tujuan (NDC) yang telah disebutkan di atas (Putri, 2022). Oleh karena itu, semua tingkatan pemerintahan memiliki peran penting dalam merancang rencana proyek dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk infrastruktur terkait perubahan iklim di Indonesia. Pada tahun 2022, 16 pemerintah kota di Indonesia melaporkan proyek infrastruktur yang terkait dengan perubahan iklim melalui CDP-ICLEI Track, dengan total biaya mencapai 453 juta dolar AS (Haesra, 2023). Hampir seluruh proyek yang dilaporkan oleh pemerintah kota di Indonesia saat ini membutuhkan pembiayaan sebagian atau penuh.

Mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis pasar (*market-based approach*) yang dijelaskan pada "Article 6 of Paris Agreement" dapat menjadi peluang untuk memobilisasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca oleh pemerintah kota/local. Penelitian ini akan mengevaluasi upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun proposal proyek untuk mengakses pendanaan melalui skema ITMO yang dilakukan

bersama dengan ICLEI dan Perspective Climate Research. Proposal ini mungkin mencakup langkah-langkah konkrit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, akses pendanaan proyek iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Dengan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan dampak proposal proyek Urban Climate Action yang melibatkan ITMO, ICLEI, dan Perspective Climate Research dalam konteks Kota Yogyakarta. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan wawasan tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat kota dan kontribusinya terhadap tujuan keberlanjutan global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah :

1. Bagaimana kerjasama Kota Yogyakarta dengan NGO ICLEI dan Perspectives dalam merancang proyek lingkungan menuju kepatuhan Perjanjian Paris di tengah tantangan urbanisasi dan pendanaan?

C. Kerangka Teori

1. Teori *Structural Adjustment*

Structural Adjustment atau "penyesuaian struktural" itu adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks kebijakan ekonomi dan pembangunan internasional. Pada awal dikenalkan, teori ini merujuk pada serangkaian reformasi ekonomi dan langkah-langkah kebijakan yang biasanya diimplementasikan oleh negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi atau mencari bantuan keuangan dari organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia (Halton, 2021).

Penyesuaian ini bertujuan untuk merestrukturisasi kerangka ekonomi suatu negara guna mengatasi ketidakseimbangan, mengurangi defisit fiskal, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah khususnya dapat mencakup: 1) Kebijakan Makroekonomi: penyesuaian kebijakan

fiskal dan moneter untuk menstabilkan ekonomi dan mengendalikan inflasi, 2) Liberalisasi Perdagangan: Membuka ekonomi untuk perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan seperti tarif dan kuota, 3) Privatisasi: Menjual perusahaan milik negara kepada sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, 4) Deregulasi: Menghapus pembatasan dan regulasi yang dapat menghambat fungsi pasar, 5) Reformasi Pasar Tenaga Kerja: Perubahan pada undang-undang dan praktik tenaga kerja untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi di pasar kerja, 6) Reformasi Sektor Keuangan: Memperkuat dan merestrukturisasi sektor keuangan untuk menjamin stabilitas dan efisiensi (Halton, 2021).

Program penyesuaian struktural telah dikritik karena dampak sosialnya, karena dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, peningkatan kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial (Shah, 2013). Kritikus berpendapat bahwa fokus pada stabilisasi ekonomi dan liberalisasi kadang-kadang dapat merugikan kesejahteraan sosial. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas dan dampak kebijakan penyesuaian struktural telah diperdebatkan, dan hasilnya bervariasi tergantung pada konteks spesifik di mana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah dan lembaga keuangan internasional mulai meninjau pengalaman penyesuaian. Di bawah tekanan dari warga negara di Dunia Ketiga yang tidak puas dengan situasi, dan kelompok-kelompok warganya yang terkait dengan negara-negara di Utara, program reformasi ekonomi mulai diimplementasikan dengan pertimbangan yang lebih eksplisit terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagai respons terhadap masalah implementasi reformasi, perhatian semakin terfokus pada isu-isu kelembagaan seperti perlunya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di pemerintahan Dunia Ketiga. Pentingnya restrukturisasi dan peningkatan birokrasi publik juga semakin diakui, bersama dengan pentingnya penguatan lembaga di tingkat lokal melalui desentralisasi dan promosi kewarganegaraan (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Kebijakan SAPs bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang diberbagai negara berkembang dengan melakukan rekonstruksi ekonomi dan mengurangi intervensi pemerintah. Kebijakankebijakan tersebut antara lain berupa program-program (1)Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga

pendidikan, (2)Deregulasi dan 2 pembukaan peluang bagi investor asing, (3)Pengurangan subsidi di berbagai sektor, (4)Stabilisasi makroekonomi, (5)Liberalisasi pasar, yang dengan demikian memperkuat pengurangan kemiskinan.

Tidak hanya diimplementasikan pada tingkat Negara, Teori SAPs ini juga dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Penerapan teori structural adjustment di tingkat pemerintah daerah sering kali mencerminkan upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan ini dapat melibatkan sejumlah langkah, meskipun penerapannya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan spesifik yang diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terlibat:

1. Reformasi Fiskal: Pemerintah daerah dapat melakukan reformasi fiskal untuk mengelola defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan. Ini mungkin melibatkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, perpajakan yang lebih baik, dan diversifikasi sumber pendapatan.
2. Manajemen Utang: Penerapan prinsip-prinsip structural adjustment dapat mencakup manajemen utang yang lebih baik, termasuk restrukturisasi utang untuk mengurangi beban pembayaran bunga.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi bagian penting dari upaya structural adjustment. Ini mencakup pengungkapan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak berkepentingan.
4. Efisiensi Birokrasi: Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah daerah dan proses birokrasi dapat menjadi fokus, termasuk reformasi kebijakan dan perubahan struktural dalam organisasi pemerintah.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah dapat fokus pada pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan.
6. Promosi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang

mendukung sektor-sektor potensial dan menciptakan lapangan kerja (Kuspradono, 2003).

Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan teori SAPs ini terhadap upaya Kota Yogyakarta dalam membangun promosi investasi dan kerjasama khususnya dengan mitra internasional untuk membantu Kota Yogyakarta dalam upaya perancangan proyek menuju kepatuhan Perjanjian Paris tentang pengendalian iklim perkotaan.

2. Konsep Pendanaan iklim

Komitmen terkait pendanaan perubahan iklim menjadi salah satu kesepakatan utama dalam berbagai perjanjian perubahan iklim global. Negara-negara maju sejak tahun 1992 pada pertemuan UNFCCC diminta untuk menyediakan sumber pendanaan baru dan tambahan bagi negara-negara berkembang sebagai bentuk komitmennya terhadap upaya perubahan iklim. Mekanisme pendanaan yang tersedia mencakup berbagai bentuk seperti hibah, pinjaman lunak hingga jaminan dan ekuitas swasta. Dana ini mengalir melalui mekanisme UNFCCC atau saluran non-UNFCCC, saluran multilateral, serta melalui jalur bilateral dan regional (Permana, Rulliadi, & dkk, 2019).

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Australia, Norwegia, dan Jepang berkontribusi pada pendanaan iklim global. Di tingkat penerima, dana internasional dikelola melalui suatu lembaga untuk menyelaraskan kepentingan kontributor dengan prioritas nasional, termasuk kemungkinan penggabungan dengan sumber pendanaan domestik. Arsitektur pendanaan iklim global ini menjadi salah satu sumber pendanaan publik bagi negara penerima dan gambaran alur serta aktor pendanaan iklim global (Marke & Sylvester, 2018).

Sumber pendanaan pada tingkat global dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dana domestik, donor pemerintah, lembaga Development Finance Institution (DFI) nasional, multilateral, bilateral, dan pendanaan iklim. Selain itu juga terdapat pendanaan swasta yang bersumber dari project developers, rumah tangga korporasi, institusi keuangan komersil seperti bank, venture capital, lembaga investasi, infrastructure funds, dan private equity. Negara penerima dapat mengakses pendanaan

internasional melalui *National Executing Agencies* atau *National Climate Fund*. *National Climate Fund* merupakan institusi khusus yang dibentuk untuk mengelola pendanaan pengendalian iklim sedangkan *National Executing Agencies* bisa berupa Kementerian atau Lembaga Negara yang terkait kegiatan pengendalian iklim (Permana, Rulliadi, & dkk, 2019).

Baik secara langsung maupun melalui perantara dalam skema UNFCCC atau di luar skema UNFCCC total pendanaan iklim pada tahun 2015 hingga 2016 rata-rata mencapai US\$463 miliar. Menurut laporan CPI (2018), DFI menjadi sumber pendanaan yang paling dominan. Keberadaan lembaga atau mitra pembiayaan pembangunan merupakan salah satu faktor kunci dalam aliran pendanaan publik global, seperti Development Finance Institution (DFI), yang mendukung investasi untuk tujuan pengendalian iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. DFI biasanya dimiliki atau didukung oleh pemerintah suatu negara, baik sebagai DFI nasional dengan modal utama dari pemerintah negara tersebut maupun sebagai DFI multilateral yang dikelola oleh lebih dari satu negara maju (Permana, Rulliadi, & dkk, 2019).

Selain institusi yang disebutkan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim global juga diperkuat oleh beberapa inisiatif dan perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral yang menyediakan atau mengalokasikan sumber daya keuangan. Inisiatif bilateral mencakup USA Global Climate Change Initiative, UK's International Climate Fund, Germany's International Climate Initiative, Japan's Fast Start Finance Fund, Norway's International Climate Forest Initiative, dan Australia's International Forest Carbon Initiative (Haesra, 2023). Sementara itu, inisiatif multilateral melibatkan Clean Technology Fund (CTF) dan Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Programme. Inisiatif-inisiatif tersebut mengalokasikan dana dari berbagai sumber dengan prosedur distribusi yang telah disepakati bersama.

Untuk mendapatkan dana untuk proyek infrastruktur terkait perubahan iklim, sebuah kota harus terlebih dahulu menyusun dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyeknya. Hal ini bertujuan agar proyek tersebut dapat menarik investasi, mempercepat pelaksanaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan

membangun kepercayaan investor. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kesiapan rencana proyek yang dapat menarik investasi, karena investor lebih cenderung berpartisipasi dalam proyek yang telah disiapkan dengan baik dan dievaluasi secara menyeluruh (Haesra, 2023).

Fasilitas Persiapan Proyek (PPF) berperan dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah selama fase persiapan proyek dalam siklus proyek, dengan tujuan menghubungkan proyek secara efisien dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaannya. Program ini dirancang untuk membantu pemerintah kota dengan faktor-faktor khusus yang bukan hanya terkait dengan proyek itu sendiri, melainkan juga dengan aspek keuangan seperti menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kapasitas, dan menjalin hubungan dengan sektor keuangan. Ini memiliki peran kunci dalam membantu pemerintah kota mempersiapkan proyek-proyek yang memiliki kelayakan finansial untuk mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan. Walaupun demikian, penting dicatat bahwa program ini tidak menyediakan bantuan pada tingkat proyek yang umumnya terkait dengan PPF. Dalam hal bantuan teknis, variasi dapat diberikan melalui beberapa cara :

1. Bantuan mandiri seperti alat bantu online, webinar sesuai permintaan, dan sumber daya lainnya.
2. Bantuan intensif melibatkan dukungan langsung dari penyedia layanan dalam bentuk konsultasi, bantuan pengembangan aplikasi, pendanaan untuk mendukung persiapan proyek, dan bentuk dukungan lainnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah bekerjasama dengan ICLEI-*Local Government for Sustainability*, sebuah NGO global yang bergerak di bidang pengendalian iklim. ICLEI didanai oleh *Germany's International Climate Initiative* untuk mempersiapkan rancangan proyek berbasis pengendalian iklim. ICLEI menunjuk Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota mitra terpilih dari beberapa kota potensial di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam mempersiapkan proyek pengendalian iklim perkotaan, ICLEI juga berkolaborasi dengan *Perspectives Climate Research* untuk hal yang lebih teknis. Hasil rancangan proyek tersebut nantinya akan digunakan untuk menarik pendanaan internasional dalam pengimplementasian proyek.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak internasional terkait dengan pendanaan iklim memiliki beberapa landasan hukum yang kuat. Hal ini dilakukan untuk membentuk mekanisme dan kerjasama yang sehat antar kedua belah pihak. Selain itu juga untuk menghindari kewenangan yang tumpang tindih maupun pelanggaran kewenangan.

D. Hipotes

Berdasarkan penjelasan di atas yang berlandaskan pada teori pembangunan berkelanjutan dan konsep pendanaan iklim maka penulis dapat merumuskan 2 hipotesis “Strategi Ketahanan Iklim Perkotaan: Mengevaluasi Langkah Kota Yogyakarta Menuju Kepatuhan Perjanjian Paris di Tengah Tantangan Urbanisasi dan Pendanaan” sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta melaksanakan proyek kerjasama untuk merancang proyek infrastruktur hijau di Yogyakarta. Program ini diharapkan akan secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan Kota Yogyakarta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca perkotaan dan berkontribusi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam NDC Indonesia (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional).
2. Kota Yogyakarta berusaha untuk mengakses pendanaan internasional untuk mewujudkan rancangan proyek dalam upaya merancang proyek lingkungan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perjanjian paris.

E. Jangkauan Penulisan

Suatu penelitian yang baik memerlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Penulis mengambil pokok permasalahan bagaimana upaya Kota Yogyakarta dapat efektif mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris, mengingat tren urbanisasi dan strategi apa yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan akses pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2021-2024. Hal ini dikarenakan proyek kerjasama Kota Yogyakarta dengan ICLEI dan Perspectives Climate Research dalam menyusun rancangan proyek pengendalian iklim perkotaan berlangsung dari tahun 2021-2024.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dirancang untuk menginvestigasi bagaimana upaya Kota Yogyakarta dapat efektif mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris, mengingat tren urbanisasi dan konsumsi energi saat ini, dan strategi apa yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan akses pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2021-2024 mengadopsi pendekatan kualitatif, mengakui kompleksitas dan sifat berlapis pada subjek penelitian tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap proses yang mendasari, motivasi, dan faktor-faktor kontekstual yang membentuk kebijakan dan kolaborasi antar aktor (Creswell & Creswell, 2018).

Komponen penting dalam desain penelitian ini adalah pengumpulan data primer melalui wawancara informal. Dengan menargetkan para pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proyek, seperti manajer proyek, pembuat kebijakan, tim peneliti ahli, dan pemimpin komunitas, wawancara informal ini bertujuan untuk menangkap beragam pandangan tentang berbagai aspek kolaborasi (Connaway & R.Powel, 2010). Format wawancara yang terbuka dan semi-struktural memungkinkan peserta memberikan wawasan rinci tentang keselarasan strategis pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya strategi ketahanan iklim perkotaan, pilihan teknologi, kebijakan kolaborasi, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta tantangan dan peluang yang mereka persepsikan. Pertimbangan etis, seperti persetujuan yang diinformasikan dan kerahasiaan, mendasari proses wawancara untuk memastikan integritas dan penghormatan terhadap hak-hak peserta (Wiles, 2013).

Selain data dari hasil wawancara, analisis data sekunder memberikan kedalaman dan konteks pada penelitian. Ini termasuk tinjauan komprehensif terhadap dokumen proyek, pedoman peraturan, laporan progres, penelitian sebelumnya, dan data elektronik lainnya terkait subjek penelitian. Dengan menganalisis materi-materi ini memungkinkan peneliti untuk mendalami perkembangan upaya kota dalam strategi ketahanan iklim, mengevaluasi tantangan urbanisasi dan pendanaan dalam proyek iklim, dan mengidentifikasi tren dan pola dalam pengadopsian proyek iklim, kepatuhan terhadap komitmen internasional, dan kesempatan mengakses pendanaan internasional dari proyek iklim.

Data kualitatif yang terkumpul melalui metode yang saling melengkapi ini akan menjadi subjek dari proses analisis yang ketat. Ini melibatkan pengkodean, pengkategorian, dan analisis tematis data untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan kunci. Penggunaan perangkat lunak analisis kualitatif dapat digunakan untuk meningkatkan organisasi dan interpretasi sistematis data. Integrasi wawancara primer dan analisis data sekunder memastikan pemahaman holistik tentang kolaborasi, didasarkan pada bukti empiris dan wawasan kontekstual (Creswell & Creswell, 2018).

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif yang menggabungkan wawancara dan analisis data sekunder, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret yang kaya dan berlapis-lapis tentang strategi Kota Yogyakarta dapat efektif mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris, mengingat tren urbanisasi dan konsumsi energi saat ini, dan strategi apa yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan akses pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendekatan ini menawarkan kedalaman dan nuansa yang diperlukan untuk menjelajahi interaksi kompleks upaya pemerintah lokal, proyek ketahanan iklim, tantangan urbanisasi dan pendanaan proyek, akses terhadap pendanaan internasional, teknologi, kepatuhan regulasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang mendefinisikan kasus ini. Desain metodologis mencerminkan komitmen pada penyelidikan yang ketat, integritas etis, dan rasa ingin tahu intelektual, membentuk dasar kontribusi yang bermakna pada bidang keberlanjutan lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam empat bab dan di bawah ini diuraikan dengan singkat mengenai sistematika penulisannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PROGRAM KERJASAMA KEMITRAAN UNTUK MERANCANG PROYEK INFRASTRUKTUR HIJAU DI YOGYAKARTA

Bab ini akan membahas mengenai upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pengendalian iklim

BAB III : RANCANGAN PROPOSAL PROYEK PENGENDALIAN IKLIM KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENGAkses PENDANAAN IKLIM INTERNASIONAL SKEMA ITMO

Bab ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme perancangan proyek pengendalian iklim perkotaan Kota Yogyakarta untuk mengakses pendanaan pengimplementasian proyek melalui pendanaan internasional dengan skema ITMO

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian dan temuan-temuan dalam penyusunan skripsi ini.